



Peranan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Simeulue 2022

The Role of the Regional Development Planning Agency in the Preparation of the Regional Development Work Plan of Simeulue Regency 2022

^{1)*} **Satris Ali Sandra**, ²⁾ **Leli Putri Ansari**

^{1,2} Program Studi Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi Universitas Teuku Umar, Meulaboh, Indonesia

*Email: ¹⁾satrisalisandra19@gmail.com, ²⁾leliputriansari@utu.ac.id

*Correspondence: satrisalisandra19@gmail.com

DOI:

10.36418/comserva.v2i3.2
66

Histori Artikel:

Diajukan : 01-08-2022
Diterima : 15-08-2022
Diterbitkan : 24-08-2022

ABSTRAK

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) merupakan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. Di dalamnya memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan sumber pendanaannya, termasuk program-program yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah dan mendorong partisipasi masyarakat. Merujuk pada RKPD yang menjadi pedoman penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Bappeda dalam penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Simeulue 2022 dan penghambatnya. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif dengan menggunakan data mentah yang diperoleh dari wawancara dengan informan. Penulis melakukan penelitian di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Simeulue di Jalan Teuku Diujung, Desa Udara Dingin, Kecamatan Simeulue Timur, Kabupaten Simeulue. Menurut temuan, peran Bappeda Kabupaten Simeulue dalam menyusun Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Simeulue 2022 belum terlaksana dengan baik. Karena mengalami disinsentif seperti lambatnya penyampaian data yang dibutuhkan, kurangnya Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan kurangnya transfer ke dana daerah (TKDD).

Kata kunci: Bappeda; RKPD; Faktor Penghambat

ABSTRACT

The Regional Development Work Plan (RKPD) is the formulation of a one (one) year Regional Medium Term Development Plan (RPJMD) which includes the formation of the Regional Economic Framework. Regional development priorities are the work plan and its funding, both of which will be implemented directly by encouraging community participation. Reference to the RKPD will serve as a guide for compiling the Regional Tax and (RAPBD). This study aims to analyze the role and inhibiting factors of Bappeda in the formulation of the 2022 Simeulue District Regional Development Work Plan (RKPD). This study is a descriptive qualitative study, using raw data and data from informant interviews, the authors conducted a search at the Simeulue Regency Regional Development Planning Authority (Bappeda) at Jalan Teuku Diujung Air Cold Village, East Simeulue District, Simeulue Regency. Based on the results of the study, it can be seen that the role of Bappeda of Simeulue Regency in formulating the 2022 Simeulue Regency Regional Development Work Plan (RKPD) has not been well executed due to disincentives. Lack of Local Origin Declaration (PAD) and lack of Transfer to Regional Funds (TKDD) due to slow transfer of required data.

PENDAHULUAN

Disetiap dalam pemerintah suatu daerah, agar lebih terlaksananya peranan Bappeda yang berjalan dengan maksimal sebagai badan yang berperan penting dalam pelaksanaan perencanaan dan pembangunan, maka daripada itu harus memiliki upaya sistematis maupun terencana. Menurut dengan pendapat dari ([Imron, 2022](#)) Terkait dengan Perencanaan pembangunan suatu daerah yang bahwa penentu keberhasilan pelaksanaan kegiatan pemerintah dan pembangunan di daerah berada di tangan pemerintah daerah itu sendiri, karena pemerintah daerah memiliki kewenangan dan kemampuan mengelola program-program pembangunan suatu daerah. Bappeda merupakan badan yang mempunyai wewenang yang bertindak langsung dan peranannya berada di bawah kemudian juga bertanggung jawab kepada Daerah ([Islamiyah, 2021](#)). Peningkatan peranan seluruh instansi pemerintah, termasuk Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Simeulue. Bappeda Kabupaten Simeulue merupakan perangkat daerah yang memiliki tugas membantu untuk menentukan pengendalian pemerintah yang transparan, akuntabel, berdaya guna, dan di bidang RKPD Kabupaten Simeulue Tahun 2022 ([Hendrowati et al., 2019](#)). Mengacu pada penelitian ini yaitu, membahas terkait Peranan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Penyusunan RKPD Kabupaten Simeulue Tahun 2022. Bagi pendidikan penelitian ini bermanfaat sebagai dasar pengetahuan tentang Rencana Kerja Pembangunan suatu Daerah ([Al Rasyid, 2017](#)). Kemudian bagi pemerintahan yakni Bappeda Kabupaten Simeulue sebagai bahan koreksi dalam menjalankan penyusunan RKPD Kabupaten Simeulue Tahun 2022 sehingga dalam perencanaan pembangunan kedepan menjadi lebih baik dari sebelumnya. Menurut ([Safriadi, 2017](#)) Perencanaan dalam arti luas diyakini sebagai proses persiapan yang sistematis dan terstruktur dengan baik untuk melaksanakan kegiatan yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan tertentu. ([Safriadi, 2017](#)). Perencanaan adalah suatu cara bagaimana mencapai sebanyak dan sebanyak mungkin, serta bagaimana membuat sumber daya yang ada menjadi efektif dan efisien ([Primayana, 2015](#)). Perencanaan merupakan suatu proses kontinu yang memiliki dua aspek yaitu formulasi pelaksanaan, dan perencanaan ([Islamiyah, 2021](#)). Salah satu persoalan mendasar kehidupan dalam bernegara suatu proses penyelenggaraan pemerintah baik di tingkat pusat, maupun di Daerah ([Arisaputra, 2013](#)). Untuk mensejahterakan masyarakat tersebut pemerintah harus melaksanakan pembangunan, kemudian selain itu untuk memelihara legitimasi, pemerintah dapat membawa kemajuan bagi masyarakat sesuai dengan perkembangan zaman.

Pembangunan pada hakikatnya yaitu salah satu bentuk upaya yang sistematis yang dilakukan secara setiap lembaga pemerintah serta seluruh bangsa demi mengubah suatu kondisi yang sebelumnya kurang baik, menjadi keadaan yang lebih baik, berbagai sumber daya yang ada baik secara efektif, efisien, maupun akuntabel dengan bertujuan untuk meningkatkan kualitas kehidupan manusia, masyarakat secara berkelanjutan ([Feisal, 1995](#)). Adapun menurut ([Kadir, 2014](#)) pembangunan ialah proses demokratisasi, dinamisasi, modernisasi. ([Fitriana, 2018](#)) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJP) merupakan penjabaran dari tujuan yang ditetapkan dengan jelas oleh UUD 1945, yaitu untuk melindungi, memajukan dan mencerdaskan kehidupan negara serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian dan perdamaian yang tetap keadilan sosial. Oleh karena itu, dapat dijadikan sebagai dasar perencanaan dan pembangunan, baik pembangunan tingkat kabupaten, provinsi maupun nasional. Kemudian, bagaimana seharusnya pembangunan itu berbagai pengertian yang telah diberikan terhadap suatu pembangunan. Pelaksanaan pembangunan masyarakat (community development) sangat tergantung kepada peranan pemerintah maupun masyarakatnya, keduanya saling mampu menciptakan sinergi tanpa melibatkan kepada masyarakat. Pembangunan hanya akan melahirkan produk-produk baru yang kurang berarti bagi masyarakatnya, tidak sesuai

dengan kebutuhan masyarakatnya. Tanpa peranan yang optimal dari pemerintah, pembangunan akan berjalan secara tidak teratur dan tidak terarah.

Terwujudnya masyarakat Simeulue yang sejahtera berdasarkan nilai-nilai syariat dan visi pembangunan Kabupaten Simeulue. Sejalan dengan pendapat dari (Bahralipi, 2017) yang bahwa arah maupun tahapan pembangunan yang jelas dapat mewujudkan arah pembangunan secara terpadu, efisien, dan berkelanjutan. RKPD disusun dengan tujuan sebagai pokok perencanaan dalam program bagi seluruh SKPD pemerintah Kabupaten Simeulue (Anelda, 2021), kemudian sebagai landasan bagi SKPD Rencana Kerja Renja Tahun 2022 agar pencapaian sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Dari hasil observasi peneliti langsung dilapangan bahwa dalam permasalahan yang terjadi dalam penyusunan RKPD Kabupaten Simeulue Tahun 2022 saat ini yaitu masih banyak yang belum terlaksana pembangunan, kurang adanya koordinasi antara SKPD terkait, dan data tidak tersedia tidak dapat dijadikan sebagai bahan dalam perencanaan pembangunan yang telah dilakukan sebelumnya. Untuk itu kedepannya supaya dalam penyusunan RKPD Kabupaten Simeulue Tahun 2022 dapat berjalan dengan lancar, Bappeda Kabupaten Simeulue harus memiliki data dalam perencanaan yang sesuai dan lengkap dalam setiap tahun.

Berdasarkan latar belakang diatas, saya sebagai penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan mengangkat judul “Peranan Bappeda Dalam Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Simeulue Tahun 2022”. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana peranan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) dalam penyusunan RKPD Kabupaten Simeulue Tahun 2022, dan diharapkan dengan hasil identifikasi ini dapat diambil solusi yang tepat sehingga kedepannya tidak terulang kembali.

METODE

Penelitian ini dilakukan di kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Simeulue, dan merupakan penelitian kualitatif deskriptif dengan menggunakan data primer hasil wawancara dengan informan yaitu Sekretaris Bappeda, Kepala Bidang, kemudian staf Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah (P2EPD) Bappeda Kabupaten Simeulue. Penelitian ini memfokuskan hanya pada prosedur dan faktor penghambat dalam Penyusunan rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Simeulue Tahun 2022, yang dilakukan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten Simeulue, dimana informan dan bahan referensi hasil penelitian sebelumnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

RKPD Kabupaten Simeulue 2017-2022 disusun dengan memperhatikan keterkaitan, sinergi dan koherensi dengan berbagai dokumen perencanaan yang lebih tinggi di tingkat Kabupaten, Provinsi dan Nasional. Sasaran kegiatan pembangunan yang tertuang dalam RKPD Kabupaten Simeulue 2022 juga ditujukan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang dihadapi berdasarkan data dan asumsi yang tepat dan akurat. Semua kegiatan pembangunan yang direncanakan diharapkan dapat dilaksanakan dan bermanfaat bagi masyarakat.

Perencanaan suatu pembangunan merupakan awal dari proses pembangunan yang memerlukan sasaran waktu yang jelas (Karsidi, 2001). Hal ini disebabkan prioritas pembangunan yang mendesak untuk diaktualisasi, sehingga perencanaan pembangunan dilakukan secara bertahap mulai dari satuan pemerintah terendah hingga ke pemerintah Daerah. Upaya-upaya pencegahan dini dimulai dari proses perencanaan, hingga pembangunan daerah dapat terlaksana secara maksimal dan tepat waktu. Pertimbangan mengenai persoalan mendasar yang dialami oleh masyarakat diharapkan cepat teratasi sehingga kesejahteraan masyarakat dapat tercapai.

Dari hasil informan perbandingan bisa dijadikan pedoman pada hasil wawancara peneliti di Bappeda Kabupaten Simeulue, untuk memberikan kontribusi dalam RKPD Kabupaten Simeulue Tahun 2022 terutama pada penyusunan RKPD Kabupaten Simeulue tahun 2022 melalui beberapa langkah-langkah sebagai berikut:

1. Penyusunan Rancangan Awal RKPD Kabupaten Simeulue Tahun 2022

Awal RKPD Kabupaten Simeulue Tahun 2022 adalah kunci dalam menentukan kualitas seluruh penyusunan RKPD ([Hendrowati et al.](#), 2019). Rancangan Awal RKPD berfungsi sebagai koridor perencanaan pembangunan indikatif untuk tahun yang direncanakan ([Yulison](#), n.d.). Kemudian penyusunan rancangan Awal ini juga dilaksanakannya persiapan pembentukan Tim, konsultasi publik dan kemudian dilanjutkan dengan penyusunan Ranwal RKPD Kabupaten Simeulue Tahun 2022, dan penyampaian Ranwal RKPD Kabupaten Simeulue Tahun 2022 ini ke Kabupaten. Dalam penyusunan RKPD, ada beberapa persiapan yang disusun Bappeda Kabupaten Simeulue yaitu sebagai berikut:

a. Pembentukan Tim RKPD kabupaten Simeulue Tahun 2022

Bappeda Kabupaten Simeulue perannya sebagai Tim penyusunan RKPD Kabupaten Simeulue Tahun 2022 yang pertama, tim yang terdiri dari Bapak Bupati beserta wakilnya untuk mengarahkan Sekretaris Daerah dan kepala Bappeda sebagai penanggung jawab. Kemudian yang kedua, adalah kelompok dari Pokja Ekonomi, Pokja Sosbud, Pokja Infrasturuk, dan kemudian Pokja keseluruhan semuanya dikoordinasikan kepala dalam bidang masing-masing. Berdasarkan temuan peneliti yang bahwa Tim penyusunan RKPD Kabupaten Simeulue Tahun 2022 adalah kabupaten Simeulue tidak memiliki sampai tuntasnya dalam penyusunan RKPD Kabupaten Simeulue terhadap dalam perorangan. Kemudian untuk kedepannya Bappeda Kabupaten Simeulue langsung memperhatikan balik Mutasi terhadap dalam Tim penyusunan RKPD Kabupaten Simeulue sampai dengan nanti ditetapkannya RKPD Kabupaten Simeulue.

b. Penyusunan Perencanaan Pembangunan Kabupaten Simeulue tahun 2022 Berdasarkan Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD)

Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD), merupakan sistem dimana dokumentasi mengolah data tersebut dalam pembangunan suatu daerah ([Irwan](#), 2022). Bappeda Kabupaten Simeulue dalam pengumpulan data, untuk itu penyusunan RKPD Kabupaten Simeulue Tahun 2022 sebagian masih ada yang melakukan dengan cara manual, artinya tidak melakukan ataupun tidak menggunakan aplikasi yang namanya Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD). Untuk itu masih ada kekurangan Tim dalam penyusunan data data yang berbasis Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD).

2. Penyusunan Rancangan Renja SKPD Kabupaten Simeulue Tahun 2022

Rancangan Renja SKPD Kabupaten Simeulue Tahun 2022 merupakan rancangan program, kegiatan yang akan dilaksanakan oleh masing-masing SKPD pada tahun yang direncanakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka menunjang pencapaian visi dan misi kepala Daerah terpilih. Penyusunan rancangan Renja Satuan Kerja Perangkat daerah (SKPD), dilaksanakan melalui pendekatan Renja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) ke Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) kemudian selanjutnya dilaksanakannya suatu penyempurnaan, rancangan Awal Renja melalui forum perangkat Daerah. Hasil penyempurnaan tersebut SKPD, menyampaikan rancangan Renja langsung ke Bappeda Kabupaten Simeulue. Sekretaris Bappeda Kabupaten Simeulue mengemukakan yang bahwa : “hasil dari suatu penyusunan rancangan Renja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), tersebut akan dibahas Bappeda Kabupaten Simeulue bersama langsung dengan kepala perangkat Daerah maupun pemangku kepentingan melalui langsung forum Konsultasi Publik, tujuannya untuk memperoleh suatu masukan maupun saran-saran.

3. Penyusunan Rancangan RKPD Kabupaten Simeulue Tahun 2022

Fase ini berupa kajian dan pembahasan draft Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang digabungkan dengan draft awal RKPD untuk direvisi. Berdiskusi dengan pemangku kepentingan untuk mendapatkan masukan dan pertimbangan dalam Musrenbang Daerah tahunan. Abstrak Rancangan RKPD Kabupaten Simeulue 2022 disampaikan oleh Kepala Bappeda Provinsi Aceh sebagai bahan masukan dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Aceh. Dalam tahapan penyusunan rancangan RKPD Kabupaten Simeulue Tahun 2022 ini, merupakan proses penyusunan rancangan Renja dilakukan Musrenbang Kecamatan, dan surat edaran bupati tentang pedoman penyusunan ranwal Renja penyusunan rancangan RKPD kabupaten Simeulue, menyampaikan rancangan ke bupati dan surat edaran bupati tentang rancangan RKPD Kabupaten Simeulue.

4. Musrenbang RKPD Kabupaten Simeulue Tahun 2022

Pelibatan masyarakat dalam penyusunan RKPD kabupaten Simeulue Tahun 2022 adalah melalui kegiatan musyawarah perencanaan pembangunan atau Musrenbang, from Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Simeulue, serta kegiatan Focus Group Discussion (FGD). Musrenbang tahunan dan from Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Simeulue dilaksanakan setiap tahun, musrenbang Kabupaten Simeulue dilaksanakan paling lambat di akhir bulan Maret dengan mengundang seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan Stakeholder. Ada beberapa tahapan musrenbang Kabupaten Simeulue Tahun 2022 yaitu:

a. Musrenbang Desa

Musrenbang tingkat desa yaitu forum musyawarah tahunan para pemangku kepentingan, ditingkat desa untuk merencanakan kegiatan tahunan anggaran berikutnya. Tingkat musrenbang desa menjadi tanggung jawab kepala Desa, kemudian difasilitasi bersama camat bersangkutan di bawah koordinasi kepala Bappeda Kabupaten Simeulue.

b. Musrenbang Kecamatan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai musrenbang yang bahwa RKPD Kabupaten Simeulue tahun 2022 ini dilaksanakan dari tingkat desa, kemudian Kecamatan, dan Kabupaten. Dalam hal ini, musrenbang tingkat dilaksanakan oleh Bappeda Kabupaten Simeulue. Kemudian Bappeda Kabupaten Simeulue mempersiapkan tempat, makanan, minuman, kemudian menyebar surat undangan musrenbang Kabupaten Simeulue. Dalam hal itu, Bappeda Kabupaten Simeulue untuk menghimpun keseluruhan usulan-usulan dalam musrenbang, harus dituangkan acara hasil musrenbang RKPD Kabupaten Simeulue Tahun 2022.

5. Rancangan Akhir RKPD Kabupaten Simeulue Tahun 2022

Setelah dilaksanakan Musrenbang Kabupaten Simeulue, Bappeda menyusun rancangan akhir dan rancangan akhir tersebut disampaikan ke Bupati Kabupaten Simeulue dalam melalui Sekda. Dari Rancangan RKPD Kabupaten Simeulue Tahun 2022, setelah difasilitasi oleh Provinsi kemudian masuk Review, kemudian setelah visi ditetapkan Perbup itu diserahkan ke bagian hukum.

Kemudian tahap berikutnya adalah pelaksanaan musrenbang RKPD Kabupaten Simeulue Tahun 2022 yakni menyempurnakan rancangan RKPD Kabupaten Simeulue Tahun 2022, kemudian hasil dari kesepakatan musrenbang RKPD Kabupaten Simeulue Tahun 2022 dan dilakukanya suatu perumusan yaitu rancangan Akhir oleh Bappeda Kabupaten Simeulue untuk dijadikan suatu bahan dalam penyusunan rancangan tentang RKPD Kabupaten Simeulue Tahun 2022.

6. Penetapan Peraturan SKPD Kabupaten Simeulue Tahun 2022

Tahapan penetapan peraturan kepala Daerah terkait RKPD Kabupaten Simeulue tahun 2022, serta menyiapkan dan penetapan Kepala SKPD. Selanjutnya setelah RKPD Kabupaten Simeulue Tahun 2022, akan di Perbupkan maka dimulailah proses penyusunan anggaran sementara (KUA).

Dalam penetapan RKPD Kabupaten Simeulue Tahun 2022 akan menjadi suatu pedoman dalam penyusunan Renja SKPD, kemudian juga menjadi panduan bagi suatu pemerintah Kabupaten Simeulue Untuk Penyusunan RAPBK Tahun 2022 dan termasuk juga di dalamnya Kebijakan Umum Anggaran.

7. Faktor-faktor yang Penghambat Penyusunan RKPD Kabupaten Simeulue Tahun 2022

Hasil dari wawancara penulis dengan Bapak Sekretaris Bappeda, Kepala Bidang, dan staf Bidang P2EPD, Kabupaten Simeulue sebagian besar dari jawaban mereka adalah ada beberapa faktor-faktor yang Menghambat Penyusunan RKPD Kabupaten Simeulue Tahun 2022 yaitu:

- a. Perubahan dalam regulasi Permendagri Nomor 13 Tahun 2006, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah dan kemudian disempurnakan didalam Kepmendagri Tahun 2021.
- b. Adanya Mutasi pada pegawai Bappeda Kabupaten Simeulue dalam tim penyusunan RKPD Kabupaten Simeulue Tahun 2022. Dimana Mutasi tersebut adalah suatu perpindahan jabatan seseorang pada unit yang berbeda-beda, ataupun suatu yang mengatur perpindahan suatu jabatan dimana salah satu mekanisme sudah diatur dalam suatu undang-undang.
- c. lambatnya dalam penyerahan data yang dibutuhkan, dan urusan OPD yang lambat
- d. Kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) perencanaan sebagai tim penyusunan RKPD Kabupaten Simeulue Tahun 2022.
- e. Minimnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan minimnya Transfer ke Dana Daerah (TKDD)/pusat.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan berdasarkan analisis data, maka peneliti menyimpulkan: RKPD didefinisikan sebagai Rencana Pembangunan Daerah. Rencana Kerja Pembangunan Daerah atau yang biasa dikenal dengan RKPD merupakan rencana pembangunan jangka menengah (RPJMD) satu tahun. Tindakan yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah atau dirancang untuk mendorong partisipasi masyarakat. Oleh karena itu, dalam rangka perbaikan dan perencanaan pembangunan yang lebih baik di masa mendatang, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Cimilou harus menambah sumber daya yang lebih berkualitas di bidang perencanaan pembangunan daerah.

DAFTAR PUSTAKA

Al Rasyid, H. (2017). Fungsi kelompok kerja guru (KKG) bagi pengembangan keprofesionalan guru

^{1*)} **Satris Ali Sandra,** ²⁾ **Leli Putri Ansari**

Peranan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Simeulue 2022

sekolah dasar. *Sekolah Dasar: Kajian Teori Dan Praktik Pendidikan*, 24(2), 143–150.

Anelda, D. W. (2021). Pendayagunaan Program Aplikasi E-Musrenbang Dalam Meningkatkan Kualitas Perencanaan Pembangunan Di Kelurahan Sei Putih Tengah Kota Medan. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ilmu Sosial Dan Politik [JIMSIPOL]*, 1(4).

Arisaputra, M. I. (2013). Penerapan prinsip-prinsip good governance dalam penyelenggaraan reforma agraria di Indonesia. *Yuridika*, 28(2). <https://doi.org/10.20473/ydk.v28i2.1881>

Bahralipi, Y. (2017). Peranan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Dalam Pembangunan Desa Di Kabupaten Jeneponto. *Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar*.

Feisal, J. A. (1995). Reorientasi Pendidikan Islam. *Gema Insani*.

Fitriana, M. K. (2018). Peranan Politik Hukum dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia sebagai Sarana Mewujudkan Tujuan Negara (Laws And Regulations In Indonesia As The Means Of Realizing The Country’S Goal). *Jurnal Legislasi Indonesia*, 12(2).

Hendrowati, R., Kurniawaty, Y., Haryanto, H. C., Trisari HP, W., Sudiarto, T. D., Utami, A. B., Siradj, F. M., Aziz, V., Naomi, P., & Radhiansyah, E. (2019). Studi Kasus Kemitraan: Perspektif Pemerintah. In *Studi Kasus*. Universitas Paramadina.

Imron, A. (2022). Proses Manajemen tingkat satuan pendidikan. *Bumi Aksara*.

Irwan, M. R. (2022). Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Sipd) Dalam Perencanaan Pembangunan Daerah Di Bapelitbang Kota Tidore Kepulauan Provinsi Maluku Utara. *Institut Pemerintahan Dalam Negeri*.

Islamiyah, D. (2021). Peranan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Dalam Pembangunan Kota Banjarbaru Tahun 2021. Universitas Islam Kalimantan MAB.

Kadir, A. G. (2014). Dinamika Partai Politik Di Indonesia. *Sosiohumaniora*, 16(2), 132–136.

Karsidi, R. (2001). Paradigma baru penyuluhan pembangunan dalam pemberdayaan masyarakat. *Mediator: Jurnal Komunikasi*, 2(1), 115–125. <https://doi.org/10.29313/mediator.v2i1.711>

Primayana, K. H. (2015). Manajemen Sumber Daya Manusia Dalam Peningkatan Mutu Pendidikan Di Perguruan Tinggi. *Jurnal Penjaminan Mutu*, 1(02), 7–15.

^{1*)} **Satris Ali Sandra,** ²⁾ **Leli Putri Ansari**

Peranan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Simeulue 2022

Safriadi, S. (2017). Prosedur pelaksanaan strategi pembelajaran ekspositori. *Jurnal Mudarrisuna: Media Kajian Pendidikan Agama Islam*, 7(1), 47–65. <https://doi.org/10.22373/jm.v7i1.1908>

Yulison, B. (n.d.). Implementasi Penyusunan Rkpd Kabupaten. *Jurnal Administrasi Pembangunan*, 2(3), 241–246.



© 2022 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY SA) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>).